

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYERAPAN  
ANGGARAN DI WILAYAH PEMBAYARAN KPPN TOLITOLI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Trisna<sup>1</sup>, Hasia Marto<sup>2</sup>, Satna Sari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Madako)

<sup>3</sup>(Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Madako)

Korespondensi Penulis : [trisna.se.2608@gmail.com](mailto:trisna.se.2608@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial Perencanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli DAN Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif verifikatif (kausal) yaitu penelitian yang berguna untuk mengukur atau menganalisis suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Populasi pada penelitian ini sebanyak 23 Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri atas 3 variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinan diperoleh nilai koefisien determinan yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,163 artinya 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 16,3% varian variabel keterlambatan penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini

*Keywords: Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang dan Jasa*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the partial effect of Budget Planning on the Delay in Absorption of Expenditures in the Tolitoli KPPN payment area AND the Effect of Human Resources on the Delay in Budget Absorption in the Tolitoli KPPN payment area. This study uses a descriptive research method of verification (causal), namely research that is useful for measuring or analyzing a variable that affects other variables. The population in this study was 23 Ministries / Institutions in the Payment Area for KPPN Tolitoli in Tolitoli Regency. The variables in this study consisted of 3 independent variables (independent) and the dependent variable (dependent). Based on the calculation of the determinant coefficient, the adjusted determinant coefficient value (*Adjusted R Square*) is 0.163, which means 16.3%. This shows that 16.3% of the variance of the delay in budget absorption can be explained by the variables of budget planning, human resources and procurement of goods / services, while the remaining 83.7% is influenced by other factors not included in this study.*

*Keywords: Budget planning, Human Resources and procurement of goods and services*

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan di Indonesia yang disusun setiap tahunnya oleh pemerintah dan mempunyai peran yang sangat penting karena menjadi alat utama bagi Negara untuk kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah pusat sebagai komponen terbesar dari belanja negara dimana berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional. Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat adalah belanja yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu perkiraan yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka pengelolaan keuangan negara menjalankan fungsinya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sedangkan Kementerian Negara/Lembaga melalui Satuan Kerja (Satker) adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)..

Kondisi penyerapan anggaran di Indonesia per triwulan khususnya untuk belanja pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini :

Tabel 1. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (Dalam Milyar Rupiah)

	2018			2019		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
Triwulan I	1.454.494,4	233.953,8	16,1%	1.634.339,5	260.735,3	15,95%
Triwulan II	1.454.494,4	558.435,1	38,4%	1.634.339,5	630.567,0	38,6%
Triwulan III	1.454.494,4	938,84	64,50%	1.634.339,5	999,34	61,15%
Triwulan IV	1.454.494,4	1225,54	84,26%	1.634.339,5	1.293,20	79,13%

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 dan 2019 pada triwulan I menurun sebesar 0,15%, triwulan II meningkat 0,2%, triwulan III menurun sebesar 3,35%, dan triwulan IV menurun sebesar 5,13%. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat hampir dipastikan bahwa setiap tiga bulan terakhir tahun anggaran terjadi peningkatan tajam pencairan dana yang melonjak dengan drastis, dimana rencana penarikan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah direncanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui oleh

Menteri Keuangan tidak dilaksanakan sesuai perencanaan. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat tidak sesuai perencanaan karena proses perencanaan yang kurang realistis ataupun adanya efisiensi dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat. Tren penyerapan yang cenderung akselerasi pada akhir semester kedua menunjukkan bahwa pola ini akan berdampak pada terganggunya kinerja rencana kegiatan dan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara umum. Hal ini berdasarkan indikator yang tercantum dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mana salah satu indikatornya yaitu tentang penyerapan anggaran yang menyatakan bahwa “Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan yaitu triwulan I (15%), triwulan II (40%), triwulan III (60%) dan triwulan IV (90%).”

KPPN Tolitoli dipilih oleh peneliti karena KPPN Tolitoli merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yang pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) pemerintah Republik Indonesia yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Umum Negara yang wilayah pembayarannya meliputi Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Sementara satuan kerja Kementerian/Lembaga merupakan *Chief Operational Officer* (COO) yang mempunyai kewenangan tertentu sesuai bidangnya masing – masing dalam pemerintahan. Adapun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan objek penelitian pada wilayah pembayaran KPPN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli.

Tabel 2. Realisasi Penyerapan Anggaran di 8 Satker Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli Tahun 2019 (Dalam Satuan Rupiah)

No	Satker	Pagu Dana	Realisasi	% Realisasi
1	Kajasiswa Negeri Tolitoli	3.965.542.000	4.361.526.232	110,25%
2	Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli	6.900.000.000	2.684.771.000	44,78%
3	Pengadilan Agama Tolitoli	78.500.000	42.820.000	53,99%
4	Kantor Kesayambandan dan Otomotif Pelatohai Tolitoli	8.780.134.000	7.787.047.183	88,69%
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli	238.944.000	183.441.926	76,77%
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli	7.872.048.000	6.836.350.789	86,77%
7	KPU Kabupaten Tolitoli	18.065.819.000	13.921.827.644	76,99%
8	BRI Tolitoli	8.887.112.000	8.164.231.371	91,89%

Sumber : KPPN Tolitoli, data diolah

Keterlambatan penyerapan anggaran juga dialami oleh delapan Satker dari dua puluh tiga Satker dengan persentase realisasi anggaran dibawah dari 90% di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli yang ada di Kabupaten Tolitoli. Adapun kondisi penyerapan anggaran didelapan Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini

Berdasarkan tabel 1.2 di Kejaksaan Negeri Tolitoli anggaran yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran masih tersisa Rp696.585.768 dari pagu dana. Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli tersisa Rp3.313.229.000 dari pagu dana. Pengadilan Agama Tolitoli tersisa Rp28.580.000 dari pagu dana. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tolitoli masih tersisa Rp993.086.815 dari pagu dana. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli masih tersisa Rp55.502.004 dari pagu dana. Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli masih tersisa Rp1.041.455.231 dari pagu dana. KPU Kabupaten Tolitoli masih tersisa Rp2.137.191.356 dari pagu dana. RRI Tolitoli masih tersisa Rp822.880.629 dari pagu dana. Nilai ini menunjukkan adanya keterlambatan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. Faktor lambatnya penyerapan anggaran menandakan Kementerian/Lembaga tidak mempunyai konsep perencanaan yang matang dan akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan. Hal ini juga yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tolitoli pada tahun 2018 dan 2019 secara umum terjadi fenomena penurunan alokasi DIPA. Dimana DIPA pada tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp598.539.855.500,-. Kemudian menurun ditahun anggaran 2019 menjadi Rp492.908216.000,-.

Penurunan alokasi DIPA ini salah satunya didasari atas kinerja Kementerian/Lembaga yang kurang maksimal ditahun sebelumnya terkait dengan penyerapan anggaran. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.02/2014 pasal 3 yang berbunyi “Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut sanksi.”

Sumber daya manusia juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian sasaran yang ditentukan oleh suatu organisasi, termasuk pemerintahan. Di dalam pengelolaan keuangan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperan penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan efisien. Namun dalam kenyataannya, PNS cenderung dianggap memiliki kapasitas (profesionalisme) yang rendah. Adanya permasalahan yang terjadi disebabkan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaannya kurang kompeten baik dalam hal pengadaan barang/jasa maupun dalam hal perencanaan anggaran. Adanya juga faktor keterbatasan SDM yang dialami oleh Kementerian/Lembaga wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang menyebabkan penyerapan anggaran terjadi keterlambatan. Perekrutan dan penetapan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang berdampak pada kemampuan pengelolaan anggaran dalam penyerapan anggaran belanja yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Salah satu kendala yang menghambat penyerapan anggaran di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli dikarenakan masalah teknis yaitu proses pengadaan atau lelang barang/jasa yang memakan waktu yang cukup panjang.

Beberapa penelitian mengenai keterlambatan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Riska (2018). Melakukan penelitian tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mutmainnah dkk (2017) meneliti tentang factor – factor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Ahmad dkk (2016) meneliti tentang Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran. Beberapa penelitian tersebut menyatakan perencanaan Anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan Anggaran dan peneliti lain menyatakan bahwa tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli? Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli? Apakah Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli? Apakah Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli? Sedangkan tujuan

Adalah Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Perencanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Untuk mengetahui pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. dan untuk mengetahui pengaruh secara simultan Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif verifikatif (kausal) yaitu penelitian yang berguna untuk mengukur atau menganalisis suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain (Umar, 2008:10). Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran atau deskripsi dari variabel yang diteliti dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar suatu variabel melalui hipotesis sehingga dengan melakukan penelitian ini dapat diketahui bagaimana

hubungan antara perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja di wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tolitoli.

Tabel 3. Gambar Sampel Penelitian

No	Nama Kementerian/Lembaga	Jumlah Responden
1	Kejaksaan Negeri Tolitoli	5 orang
2	Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli	5 orang
3	Pengadilan Agama Tolitoli	5 orang
4	Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Tolitoli	5 orang
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli	5 orang
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli	5 orang
7	KPU Kabupaten Tolitoli	5 orang
8	RRI Tolitoli	5 orang
<b>Jumlah Sampel</b>		<b>40 orang</b>

Sumber : KPPN Tolitoli

Populasi pada penelitian ini sebanyak 23 Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli yang mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung dalam proses penyerapan anggaran dengan rincian jabatan antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yaitu berjumlah 115 orang. Sampel pada penelitian ini sebanyak 8 Kementerian/Lembaga di Wilayah pembayaran KPPN Tolitoli di Kabupaten Tolitoli yang mempunyai realisasi anggaran dibawah 90% yaitu berjumlah 40 responden. Adapun kriteria yang digunakan yaitu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung dalam proses penyerapan anggaran dengan rincian jabatan antara lain Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2019:131).

Operasional variabel dimaksudkan untuk menerangkan variabel-variabel yang digunakan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri atas 3 variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Agar peneliti terarah, maka pada bagian ini akan diuraikan masing – masing variabel tersebut sebagai berikut :

#### **Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen), yang disimbolkan dengan (X).

- 1) Perencanaan Anggaran ( $X_1$ ) merupakan tahap awal dalam mekanisme pengelolaan anggaran. Indikator variabel ini adalah proses penyusunan dokumen anggaran, kondisi penyusunan dokumen anggaran, pembahasan anggaran, dan revisi oleh pejabat berwenang. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 8 butir pernyataan dengan menggunakan skala Likert;
- 2) Sumberdaya manusia ( $X_2$ ) yaitu kemampuan dan ketersediaan jumlah pegawai yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan khususnya pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyerapan anggaran. Indikator variabel ini adalah pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 9 butir pernyataan dengan menggunakan skala Likert; dan
- 3) Pengadaan barang dan jasa ( $X_3$ ) yaitu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Indikator variabel ini terdiri dari penyusunan panitia pengadaan, penyusunan standar harga, dan pelaksanaan lelang. Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 11 butir pernyataan dengan menggunakan skala Likert.

#### Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen), yang disimbolkan dengan (Y). Keterlambatan penyerapan anggaran (Y) yaitu keterlambatan waktu dalam menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam APBN dengan indikator anggaran tidak dapat terserap secara maksimal dalam satu tahun anggaran. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner yang terdiri dari 3 butir pernyataan dengan menggunakan skala Likert.

Data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: kuesioner, wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda. Rumus yang digunakan pada uji persamaan regresi adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Keterlambatan Penyerapan Anggaran

$a$  = Konstanta

$X_1$  = Perencanaan anggaran

$X_2$  = Sumber daya manusia

$X_3$  = Pengadaan barang/jasa

$e$  = error term

Untuk menguji permasalahan dan hipotesis pertama, kedua dan ketiga digunakan uji  $t$  dan uji  $F$

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda sebelum dilakukan pengujian secara statistik keseluruhan data yang diperoleh dari hasil tabulasi jawaban kuesioner diklasifikasikan kedalam skor interval, dikarenakan skala data yang dihasilkan adalah data ordinal maka terlebih dahulu hasil pengukuran skala ordinal ditransformasikan kedalam bentuk skala interval dengan *Method of Successive Interval* (MSI) menggunakan program computer *succ97*.

Hasil uji regresi dapat dirumuskan kedalam persamaan umum regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y=2,240 +0,136X_1+0,056X_2+0,044X_3 +e$$

1. Konstanta sebesar 2,240 menggambarkan bahwa tanpa ada pengaruh dari kedua variabel independen dan faktor lain, maka variabel kinerja manajerial memiliki nilai sebesar 2,240.
2. Koefisien regresi variable perencanaan Anggaran (X1) sebesar 0,136. Hal ini berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Perencanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. artinya apabila Perencanaan Anggaran baik maka keterlambatan penyerapan anggaran semakin berkurang .
3. Koefisien regresi variable Sumber daya Manusia (X2) sebesar 0,056. Hal ini berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Sumber Daya Manusia terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. artinya bahwa semakin baik Sumber Daya Manusia maka keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli semakin berkurang.
4. Koefisien regresi variable Pengadaan Barang dan Jasa(X3) sebesar 0,044. Hal ini berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif antara Pengadaan Barang/Jasa terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. artinya bahwa semakin baik Pengadaan Barang/Jasa maka keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli semakin berkurang.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinan diperoleh nilai koefisien determinan yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,163 artinya 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 16,3% varian variabel keterlambatan penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan keempat variabel secara simultan dan parsial dilakukan dengan uji  $t$  dan uji  $F$ . Uji  $F$  bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel terikat. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  untuk seluruh variabel secara simultan adalah sebesar 3,401 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Dengan kata lain, nilai  $F_{hitung}$  ( $3,401$ )  $>$   $F_{tabel}$  ( $3,27$ ) dan nilai signifikansi ( $0,029$ )  $<$  ( $0,05$ ). Hal ini berarti  $H_4$  diterima, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran sehingga semakin tinggi kesalahan dalam perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli akan menyebabkan tingginya keterlambatan penyerapan anggaran yang akan terjadi. Berdasarkan hasil perhitungan uji t dari tiga variabel bebas ditemukan hasil bahwa:

- 1) Nilai  $t_{hitung}$  variabel perencanaan anggaran adalah sebesar 2,126 dengan nilai signifikansi sebesar 0,041. Dengan kata lain nilai  $t_{hitung}$  ( $2,126$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $2,032$ ) dan nilai signifikansi ( $0,041$ )  $<$  ( $0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan  $H_1$  diterima. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran dengan berpengaruh bersifat positif sehingga semakin tinggi kesalahan dalam penyusunan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli akan menyebabkan rendahnya keterlambatan penyerapan anggaran.
- 2) Nilai  $t_{hitung}$  variabel sumber daya manusia adalah sebesar 0,431 dengan nilai signifikansi sebesar 0,669. Dengan kata lain, nilai  $t_{hitung}$  ( $0,431$ )  $<$   $t_{tabel}$  ( $2,032$ ) dan nilai signifikansi ( $0,669$ )  $>$  ( $0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan  $H_2$  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran sehingga semakin tinggi sumber daya manusia yang dimiliki pada Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tidak mempengaruhi rendahnya keterlambatan penyerapan anggaran.
- 3) Nilai  $t_{hitung}$  variabel pengadaan barang/jasa adalah sebesar 0,533 dengan nilai signifikansi sebesar 0,598. Dengan kata lain, nilai  $t_{hitung}$  ( $0,533$ )  $<$   $t_{tabel}$  ( $2,032$ ) dan nilai signifikansi ( $0,598$ )  $>$  ( $0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan  $H_3$  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran sehingga semakin tinggi pengadaan barang/jasa pada Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tidak mempengaruhi rendahnya keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis untuk menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran menunjukkan bahwa perencanaan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyebutkan bahwa diduga ada pengaruh perencanaan anggaran terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  dapat diterima.

Hal ini didukung juga dengan pernyataan responden mengenai perencanaan anggaran

yang dijawab oleh responden, sebagian besar persentase jawaban responden mengacu pada pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) sebesar 40,79%. Berdasarkan hasil persentase tersebut, dapat diketahui persentase terbesar pertama dengan pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) pernyataan keenam dengan pernyataan “Perencanaan yang tidak matang menyebabkan adanya revisi, sehingga kegiatan sulit atau terlambat di eksekusi” dengan persentase sebesar 52,6% dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan yang tidak matang pada 8 Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli yang menyebabkan adanya revisi sehingga kegiatan sulit atau terlambat di eksekusi. Persentase terbesar kedua dengan pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) terletak pada pernyataan pertama dan ketujuh. Pernyataannya pertama yaitu “Dalam penyusunan dokumen, terdapat mata anggaran yang tidak tersedia untuk kegiatan tertentu” dan pernyataan ketujuh yaitu “Proses revisi DIPA sering mengalami keterlambatan” dengan persentase sebesar 50%. Hal ini didukung dengan penelitian Riska (2018) yang menyebutkan bahwa “Lambatnya penyerapan anggaran juga mengindikasikan institusi tidak mempunyai konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur. Tidak adanya konsep perencanaan anggaran secara riil akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran”.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesalahan dalam perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli menyebabkan terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyebutkan bahwa diduga ada pengaruh sumber daya manusia terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan kuesioner mengenai sumber daya manusia yang dijawab oleh responden sebagian besar persentase jawaban responden mengacu pada pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) sebesar 53,81%. Berdasarkan hasil persentase tersebut, dapat diketahui persentase terbesar yaitu terletak pada pernyataan kedelapan dan ketujuh. Pernyataan kedelapan yaitu “Terbatasnya SDM yang sesuai bidang keuangan sehingga kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pencairan dengan persentase sebesar 71,1% dan pernyataan ketujuh yaitu “Terbatasnya SDM pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat dan sesuai keahliannya sehingga menyebabkan pelaksanaan kurang kompeten”. Hal ini menunjukkan bahwa terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli baik dalam bidang keuangan maupun pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli masih rendah. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendah atau tidaknya suatu sumber daya manusia yang dimiliki oleh 8 Satker di wilayah pembayaran

KPPN Tolitoli tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran.

Walaupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli masih rendah, namun masih ada beberapa faktor yang tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Faktor tersebut dapat dilihat dari item pernyataan dengan jumlah persentase *mean* terbanyak yang pertama dijawab oleh responden dengan skala 4 (setuju) yaitu “SDM di Satker telah mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa” dengan persentase 65,8%.

Pernyataan dengan jumlah persentase *mean* yang terbesar kedua yaitu dengan skala 3 (kurang setuju) dimana terletak pada pernyataan pertama dengan pernyataan “Aparatur pelaksana pengadaan kurang berkompeten dalam menangani program/kegiatan” dengan persentase sebesar 36,8%. Adapun pernyataan dengan jumlah persentase *mean* terbesar ketiga yaitu dengan skala 5 (sangat setuju) dimana terletak pada pernyataan kesembilan yaitu “Pimpinan selalu memberikan dukungan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan” dengan persentase sebesar 36,8%. Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah SDM yang ada di Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli hanya sedikit atau terbatas, akan tetapi pimpinan selalu memberikan dukungan serta bimbingan kepada para pegawainya dalam melaksanakan kegiatan dan juga SDM di 8 Satker wilayah pembayara KPPN Tolitoli telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa sehingga sumber daya manusia di Satker tersebut termotivasi untuk memberikan kinerja yang terbaik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska (2018) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hertati (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil hypothesis yang ketiga dilakukan untuk melihat Pengaruh Pengadaan Barang/Jasa terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran dari hasil pengujian ditemukan bahwa pengadaan barang/jasa secara parsial tidak berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyebutkan bahwa diduga ada pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada 8 Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak.

Berdasarkan pernyataan kuesioner mengenai pengadaan barang/jasa yang dijawab oleh responden, sebagian besar persentase jawaban responden mengacu pada pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) sebesar 48,57%. Berdasarkan data tersebut maka dapat diindikasikan bahwa dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh 8 Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tergolong cukup baik sehingga menghasilkan keterlambatan penyerapan anggaran yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase terbesar pertama dengan pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) pada pernyataan ketiga dan keenam yaitu “Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan diawal tahun anggaran” dan “Pengadaan barang dan jasa dilaporkan

tepat waktu oleh panitia pengadaan” dengan nilai persentase sebesar 65,8%. Persentase terbesar kedua dengan pilihan jawaban dengan skala 4 (setuju) terletak pada pernyataan kedua yaitu “Jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai tepat waktu sesuai rencana kegiatan Satker” dengan persentase sebesar 63,2%.

Hal ini menunjukkan bahwa jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan diawal tahun anggaran dan dilaporkan tepat waktu oleh panitia pengadaan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya suatu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh 8 Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Riska (2018) yang menghasilkan bahwa pengadaan barang/jasa tidak memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Hertati (2016) yang menghasilkan bahwa pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis keempat untuk menguji pengaruh Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Keterlambatan Penyerapan Anggaran KPPN tolitoli menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa secara simultan berpengaruh positif terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang menyebutkan bahwa diduga ada pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa keterlambatan penyerapan anggaran pada Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima dengan pengaruh bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa secara simultan akan mengurangi keterlambatan penyerapan anggaran di Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riska (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil interpretasi dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli, maka didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada 8 Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesalahan perencanaan anggaran pada 8 Satker di wilayah pembayaran KPPN Tolitoli yang dihasilkan akan menyebabkan tingginya keterlambatan penyerapan anggaran.

2. Sumber daya manusia secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa setiap peningkatan sumber daya manusia tidak akan mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya suatu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran.
3. Pengadaan barang/jasa secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Ini berarti bahwa setiap peningkatan pengadaan barang/jasa tidak akan mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya suatu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran.
4. Perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran pada Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli dengan memberikan kontribusi sebesar 0,163 atau sebesar 16,3%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesalahan perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa secara simultan akan meningkatkan keterlambatan penyerapan anggaran pada Satker wilayah pembayaran KPPN Tolitoli.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Ahmad. 2015. Siklus Anggaran. Melalui <http://www.wikiapbn.org/siklus-anggaran.html>. [28/07/20].
- Ahmad Rifai, dkk. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 11(1), Januari 2016.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2018. *Data Publikasi Dashboard Kinerja Pagu dan Realisasi KPPN Tolitoli*. Melalui <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id>. [12/04/19].
- Elbadiansyah. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Purwokerto : CV. IRDH.
- Fandi, Zaenudinsyah. 2016. Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN Akhir Tahun Anggaran. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*. 1(1): 67-83
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan. 2019. Informasi APBN Kita. Melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita.html>. [04/09/20].

- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Menteri Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
- Menteri Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA.
- Menteri Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Menteri Keuangan. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.
- Mutmainna dan Muhammad Iqbal. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Assets*. 7(1): 120-132.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman APBN.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
- S.A, Hertati dan Simanjuntak. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD di Pemerintah Kota Medan. *Tesis*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana.
- Wulandari, Riska. 2018. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Palembang : Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
- Mutmainnah, Iqbal. 2016. factor – factor yang mempengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah
- Ahmad, Biana. 2017. Analisis Faktor –faktor yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran (studi empiris skpd Pemprov NTB).